

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
EKONOMI PEREMPUAN DI DESA KALAWARA
KECAMATAN GUMBASA KABUPATEN SIGI**

***IMPLICATIONS OF WOMEN'S ECONOMIC PRODUCTIVITY
IMPROVEMENT POLICY IN KALAWARA VILLAGE
GUMBASA DISTRICT SIGI REGENCY***

¹Anton, ²Andi Irwan, ³Pariyati

^{1,2,3}*Bagian Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Palu
(Email : anton012@gmail.com)
(Email : andi_irawan@gmail.com)
(Email : atipariyati@gmail.com)*

ABSTRAK

Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Adalah kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, dalam bentuk peningkatan kualitas kesehatan, kualitas pendidikan, dan penghapusan berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan. Dalam meningkatkan produktivitas perempuan (PPEP) diperlukan implementasi agar kebijakan tersebut dapat dirasakan tujuan dan manfaatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 58 Tahun 2004 tentang Kebijakan dan Peningkatan Strategis Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Serta mengidentifikasi peran masing-masing instansi terkait dan pribadi di Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi. Jenis penelitian yang digunakan Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data menggunakan Van meter dan teori implementasi Van Horn. Dalam teori ini diasumsikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementasi dan kinerja kebijakan publik itu sendiri. Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan yang ditentukan oleh beberapa aspek menurut Van Meter dan Van Horn adalah: 1. Tujuan Kebijakan, 2. Aspek sumber-Sumber Kebijakan, (3. Aspek Implementasi dan Aktivitas Komunikasi antara organisasi 4. 4. Kriteria Implementor (Implementor), 5. Aspek Pengimplementasi Pelaksana Implementor, 6. Aspek Ekonomi, Sosial, Kondisi Politik.

Kata Kunci: Implementasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan

ABSTRACT

Increased Productivity of Women's Economics (PPEP). It is the policy to improve the quality of life of women, in the form of improvement of health quality, quality of education, and the elimination of various acts of violence against women. In improving the productivity of women (PPEP) required implementation so that the policy can be perceived goals and benefits. The purpose of this research is to analyze the implementation of the policy of the State Minister of Women Empowerment RI Number 58 of 2004 on Policy and Strategic Improvement of Women's Economic Productivity (PPEP). As well as identify the role of each related and personal agencies in the Village District Kalawara Gumbasa Sigi district. Type of research used Descriptive Qualitative. Data collection using Van meter and Van Horn implementation theory.

In this theory it is assumed that policy implementation runs linearly from public policy, implementation and performance of public policy itself. In addition, the success of the implementation of a policy determined by some aspects according to Van Meter and Van Horn are: 1. Policy Objectives, 2. Aspects of sources -Sources of Policy, 3. Aspects of Implementation and Communication Activities between organizations 4. 4. Criterion Implementor (Implementor), 5. Aspects of Implementor Implementer's Imposition, 6. Aspect of Economic, Social, Political Conditions.

Keywords: *Implementation of increased productivity of women economy*

PENDAHULUAN

Keputusan Menteri Pemberdaya Perempuan Republik Indonesia Nomor 58/SK/MENEG.PP/XII.2014 Tentang Penetapan kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang patut diaspresiasi, dimana terdapat program pemberdayaan perempuan secara nasional yang kita sebut Kebijakan Peningkatan Produktivitas Perempuan (PPEP).

Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah telah merespon kebijakan PPEP. Tersebut diawali adanya pencanangan Model Desa atau Model Kelurahan PRIMA (Perempuan Indonesia maju mandiri) yang tersebar kegiatannya di 10 kabupaten dan 1 kota. Perlu ada pengawasan bahwa penelitian ini adalah meneliti implemntasi program peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) yang mulai dilaksanakan sejak pencangan pada tahun 2010.

Pencanangan kegiatan program PPEP. Di Desa Kalawara dengan pertimbangan bahwa Desa Kalawara memiliki berbagai potensi khususnya jumlah penduduk, dimana penduduk berjenis perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah laki –laki selain itu Desa kalawara berada pada zona strategis dapat dijangkau oleh desa sekitarnya untuk percontohan penerapan program PPEP.

Penetapan Desa Kalawara menjadi pusat implementasi program PPEP tentunya bertujuan agar Desa kalawara menjadi Desa PRIMA.dimana masalah–masalah di desa tersebut yang berkaitan dengan keberadaan perempuan mendapatkan solusi, kualitas terutama masalah kesenjangan kualitas hidup sebagai perempuan desa, masalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, terbatasnya keterampilan.

Perempuan di Desa Kalawara banyak berharap agar kehidupan mereka dapat berubah ketika program PPEP tersebut terimplementasi di desanya, sebagaimana tujuan kebijakan Peningkatan produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) itu sendiri secara umum tujuan program PPEP adalah meningkatkan taraf hidup perempuan Desa atau Kelurahan, denga harapan

menurunkan tingkat kemiskinan suatu wilayah melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan secara terpadu dan bersinergi melalui pengurangan beban biaya pada keluarga miskin di bidang kesehatan dan pendidikan.

Jelas bahwa sasaran kebijakan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan adalah peningkatan martabat perempuan Indonesia, bagi penulis perlu mendalami kebijakan ini melalui penelitian yang komprehensif dan objektif sehingga dapat dipastikan implementasinya berjalan dengan baik sesuai harapan. Asumsi yang melandasi pengembangan pengurangan beban biaya pendidikan dan kesehatan dari keluarga miskin adalah bahwa untuk menanggulangi kemiskinan dalam pengertian memutuskan rantai lingkaran setan kemiskinan. Maka dari itu upaya ini seharusnya dititik beratkan pada pemberdayaan dan peningkatan produktivitas kaum perempuan, karena dalam berbagai hal kaum perempuan selalu menjadi korban atau menjadi yang dikorbankan, oleh karena itu upaya yang harus dilakukan harus benar-benar berpihak pada kaum perempuan, baik anak perempuan keluarga miskin yang wajib belajar, seluruh populasi perempuan anggota keluarga miskin yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, maupun kelompok perempuan yang telah mampu mengembangkan kegiatan usaha ekonomi kreatif.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar belakang yang berkonteks khusus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dengan menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Meleong, 2007:5) Penelitian kualitatif merupakan studi terhadap suatu fenomena dalam situasi dimana fenomena tersebut ada dan berorientasi pada penemuan. Penelitian dengan metode kualitatif tidak menguji hipotesis, tetapi hendak menemukan makna fenomena yang hendak dikaji. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengkaji, memberikan gambaran serta jawaban terhadap permasalahan penelitian. Dalam penelitian kualitatif digunakan pendekatan induktif, yaitu teori sesungguhnya digunakan sebagai alat yang akan diuji kemudian dengan data dan instrumen penelitiannya. Lokasi penelitian ini adalah tepatnya di Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dan Waktu penelitian ini dilaksanakan(dilakukan) selama 2 (dua) bulan. Teknik pemilihan informan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah dengan cara sengaja atau *purposive sampling*. Teknik ini digunakan untuk menentukan informan yang dibutuhkan sebagai sumber data berdasarkan asumsi bahwa informan tersebut mempunyai karakteristik yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah ditetapkan oleh penulis. Jumlah informan yang dipilih sebagai sampel penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan data, keakuratan informasi. Oleh karena itu penulis menetapkan informan penelitian berdasarkan pada pengetahuan dan serta profesi yang dimilikinya. Maka informan itu adalah :

- 1) Pelaksana Kebijakan (Dinas Pemberdayaan Perempuan Kab. Sigi). 1 orang
- 2) Kepala Desa Kalawara 1 orang
- 3) Perempuan Penggerak Ekonomi Desa kalawara 1 orang
- 4) Pegawai Kantor Camat Gumbasa 1 orang
- 5) Ketua Adat 1 orang dan, Pelaku Ekonomi Desa kalawara 1 orang.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang banyak digunakan kalangan peneliti adalah analisis model interaktif (*interactive of analysis*) dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Reduksi data (*reduction data*) yaitu tindakan penulis setelah mendapatkan data primer (data diperoleh langsung dari lapangan) maupun data sekunder secara lengkap dan terperinci kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dikelompokkan, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyutungan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahap ini setelah data dipilih kemudian disederhanakan, data yang diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penyusunan laporan, penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara. 2) Penyajian Data (*display data*) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi penulis untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan di didikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi. 3) Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)/Verifikasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) faktor yang hendak dibahas, dimana faktor-faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, terutama kebijakan yang bersifat program pelayanan. 3 (tiga) factor yang maksud adalah faktor-faktor yang dikemukakan oleh Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012 :159), yang menjadi faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan, terletak pada ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan dari kebijakan, dalam hal ini Van Meter dan Van Horn mengandaikan bahwa implemementasi kebijakan secara linear dalam Riant Nugroho (2011 : 627), serta menjadi aspek yang mampu mengidentifikasi indikator-indikator kinerja, serta masa yang krusial dalam menganalisis ketepatan isi dari sebuah kebijakan. Dan oleh karena itu pelaksana/impelementor seharusnya memiliki kemampuan analisis terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. merupakan tahap krusial dalam analisis implemementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil yang disimpulkan:

Bahwa eksistensi dari kebijakan menteri negara pemberdayaan perempuan Nomor 58/SK/Meneg.PP/XII/2004 Tentang Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), adalah untuk menjadikan perempuan khususnya di Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi lebih produktif, memiliki penghasilan dalam menunjang kesejahteraan hidup keluarga.

Hal ini berdasarkan teori model implementasi Van Meter dan Van Horn, bahwa keberhasilan implementasi sebuah kebijakan ditentukan oleh ukuran-ukuran dasar dari kebijakan tersebut. Hal ini mengandung bahwa Kebijakan PPEP memberikan informasi bahwa isi kebijakan tersebut memuat unsur-unsur dasar serta tujuan-tujuan kebijakan untuk kepentingan dan kemaslahatan publik.

1. Karakteristik Agen Pelaksana/ Implementor

Yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana/implementor menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012 : 166), adalah para peminat politik birokrasi, mereka telah mengidentifikasi banyak karakteristik badan-badan administrasi yang telah mempengaruhi pencapaian kebijakan mereka.

Dalam hal ini Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012 : 166) mengentengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, unsur-unsur tersebut ialah 1). Komposisi dan ukuran staf suatu

badan. 2). Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan–keputusan sub unit dan proses–proses dalam badan–badan pelaksana, 3). Sumber–sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota–anggota Legislatif dan Eksekutif, 4). Vitalitas suatu organisasi, 5). Tingkat komunikasi–komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu–individu di luar organisasi, 6). Kaitan formal dan informal suatu badan/agen pelaksana/implementor dengan badan “pembuat keputusan” atau pelaksana keputusan

2 Sumber–Sumber Kebijakan

Berdasarkan Pendapat Teori Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012 :161) bahwa disamping ukuran–ukuran dasar dan tujuan–tujuan kebijakan, yang perlu mendapat perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber–sumber yang tersedia.

Disinilah penulis menggaris bawahi dalam penelitian ini bahwa masyarakat Desa khususnya Desa Kalawara dalam meningkatkan Produktivitas Ekonomi dalam menunjang kehidupan dan penghasilan dalam rumah tangga mencari sumber–sumber pembiayaan PPEP antara lain sebagai berikut : 1). Perlu mendorong ke arah peningkatan kelanjutan program dimana kebijakan PPEP terus diimplementasikan, dan menciptakan inovasi–inovasi dalam lembaga pengelolaan ekonomi yang merupakan peningkatan dari program PPEP, baik dalam bentuk kelompok maupun individu. 2). Lembaga pemberdaya perempuan di kabupaten Sigi mampu membangun kepercayaan publik tidak hanya bergantung pada subsidi pusat dan provinsi sebab kebijak PPEP tergantung pada implementornya. 3). Lembaga Pemberdaya perempuan di Kabupaten Sigi seharusnya membangun dan meningkatkan kerja sama dengan lembaga–lembaga swasta baik dalam negeri maupun dari luar negeri terutama memberikan ruang pembiayaan bagi kelangsungan kesejahteraan perempuan di desa khususnya Desa kalawara, dengan demikian masyarakat akan terbiasa peduli terhadap sesama dan secara ekonomis masyarakat memperoleh nilai tambah dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

2. Kebijakan PPEP

- Hal tersebut disebabkan adanya beberapa kendala :
 - 1) Minimnya koordinasi dan komunikasi antar organisasi pada pemerintah di Kabupaten Sigi dalam mengatasi problem kemiskinan.

- 2) Lemahnya komitmen organisasi pemerintah Kabupaten Sigi dalam menyusun anggaran biaya untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pedesaan.
 - 3) Adanya egosentral yang dimiliki oleh masing–masing organisasi pemerintah sehingga akibatnya rendahnya aktivitas organisasi pemerintah dalam mengimplementasikan Kebijakan PPEP.
- Tiga poin di atas merupakan analisa penelitian penulis yang menjadi faktor penghambat aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi di dalam mengimplementasikan Kebijakan menteri Pemberdaya Perempuan PPEP. Dengan kata lain aktivitas implementor/para pelaksana komunikasi antar organisasi pemerintah belum terlaksana sesuai harapan kebijakan itu sendiri.

4. Tujuan - Tujuan kebijakan

Hal ini berdasarkan teori model implementasi Van Meter dan Van Horn, bahwa keberhasilan implementasi sebuah kebijakan ditentukan oleh ukuran–ukuran dasar dari kebijakan tersebut. Hal ini mengandung bahwa Kebijakan PPEP memberikan informasi bahwa isi kebijakan tersebut memuat unsur–unsur dasar serta tujuan–tujuan kebijakan untuk kepentingan dan kemaslahatan publik.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan, Endang Makuraga, Kepala Sub Bidang PKHP dan PUG BPPKB Badan Pemberdaya Perempuan Kabupaten Sigi, dapat disimpulkan bahwa :

Apa yang telah diupayakan pemerintah selama ini dalam menggulangi ekonomi khususnya, bagi peran perempuan yang memiliki produktivitas yang tinggi, mestinya mendapat dukungan dari semua pihak, baik pihak pemerintah, pihak swasta lebih khusus dukungan dari masyarakat.

5. Sumber –Sumber Kebijakan

sumber yang tersedia. Dari hasil wawancara dengan informan, Endang Makuraga yang menangani Program PPEP, dimana jabatan beliau adalah Kepala Sub Bidang PKHP dan PUG BPPKB Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sigi, dapat disimpulkan bahwa :

Karna akibat terbatasnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah sehingga pemberdayaan Produktivitas Ekonomi Perempuan di Desa Kalawara terhenti tidak dapat berjalan sebagaimana harapan semula.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa sumber-sumber kebijakan berupa pembiayaan sebuah kebijakan perlu pula memerhatikan sumber-sumber perolehan dana sebagai upaya kelangsungan implementasi, kelemahan kebijakan tidak terimplementasi secara baik karna adanya keterbatasan anggaran tidak berlangsung secara *continue*. Atau tidak terlaksana artinya ada kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan, namun ada pula kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk melihat secara obyektif bahwa kebijakan PPEP tersebut tidak akan terlaksana tanpa ada dukungan dan pembiayaan atau anggaran yang disiapkan. Disinilah penulis menggaris bawahi dalam penelitian ini bahwa masyarakat Desa khususnya Desa Kalawara dalam meningkatkan Produktivitas Ekonomi dalam menunjang kehidupan dan penghasilan dalam rumah tangga mencari sumber-sumber pembiayaan PPEP antara lain sebagai berikut :

- 1). Perlu mendorong ke arah peningkatan kelanjutan program dimana kebijakan PPEP terus diimplementasikan, dan menciptakan inovasi-inovasi dalam lembaga pengelolaan ekonomi yang merupakan peningkatan dari program PPEP, baik dalam bentuk kelompok maupun individu.
- 2). Lembaga pemberdaya perempuan di kabupaten Sigi mampu membangun kepercayaan publik tidak hanya bergantung pada subsidi pusat dan Provinsi sebab kebijak PPEP tergantung pada implementornya.
- 3). Lembaga Pemberdaya perempuan di Kabupaten Sigi seharusnya membangun dan meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga swasta baik dalam negeri maupun dari luar negeri terutama memberikan ruang pembiayaan bagi kelangsungan kesejahteraan perempuan di desa khususnya Desa kalawara, dengan demikian masyarakat akan terbiasa peduli terhadap sesama dan secara ekonomis masyarakat memperoleh nilai tambah dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang dibahas pada Bab 4 penelitian tentang Implementasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) di Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, dengan menggunakan pendekatan teori model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan implementasi Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) di Desa kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten

Sigi telah terlaksana, namun belum sesuai harapan tujuan dan manfaat kebijakan PPEP, karna terdapat aspek yang belum terpenuhi. Aspek yang belum terpenuhi adalah : 1) Aspek Sumber–Sumber Kebijakan, 2). Aspek Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar Organisasi, 3). Sementara: (1). Aspek ukuran–ukuran dasar dan tujuan–tujuan kebijakan, (2). Aspek Kerakteristik Agen Pelaksana, (3). Aspek kecenderungan, (4). Aspek Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik terpenuhi. Saran yang direkomendasikan peneliti untuk Aspek Sumber–Sumber Kebijakan, disarankan agar organisasi pemerintah Kabupaten Sigi melanjutkan dan mengambil kebijakan pembiayaan implementasi kebijakan PPEP di Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa. Dan Aspek Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, disarankan menyusun program–program terpadu antar lembaga yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Sigi tentang pemberdayaan perempuan yang bergerak pada perbaikan hidup masyarakat khususnya di Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswori dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Bhineka Chipta.
- Keputusan Menteri Pemberdaya Perempuan Republik Indonesia Nomor 58/SK/MENEG.PP/XII.2014 Tentang Penetapan kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan(PPEP).
- Mifflin Company., dan Agustino leo. 2008. *Dasar–Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Nasution, S. 1996. *Metodologi Penelitian Naturalistik–Kualitatif*. Tarsito. Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu. 1983. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Satori dan Komaria. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Winarno Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.